

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# DKI Ajukan APBD 2023 Rp 82,5 Triliun

## Gambir, Warta Kota

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati, angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 82,5 triliun.

Angka tersebut merupakan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan selama empat hari sejak Senin (31/10) sampai Kamis (3/11), termasuk pendalaman saat rapat pimpinan gabungan (Rapingab).

"Dapat disepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan plafon prioritas anggaran sementara sebesar Rp 82,5 triliun untuk dapat disetujui," kata Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pada Minggu (6/11).

Prasetyo memastikan, KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023 akan memasuki tahapan penandatanganan kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

"Berdasarkan pasal 16 ayat 6 bahwa Kebijakan

umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Selanjutnya akan segera kita jadwalkan melalui rapat Bamus," jelasnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri menjelaskan, nilai tersebut setara dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 82.543.539.889.450. Dengan demikian, jumlah pendapatan dan jumlah belanja dinilai seimbang.

"Ini setara dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan, yaitu sebesar Rp 82.543.539.889.450 sehingga sudah balance atau seimbang antara pendapatan dan belanja," ujar Edi.

DPRD DKI Jakarta menargetkan, Raperda APBD DKI Jakarta tahun 2023 akan disahkan pada akhir November 2022. "Paripurna pengesahan Raperda tentang APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) rencananya akan dilakukan pada 28 November 2022," kata Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta Khoirudin pada Minggu (6/11).

Khoirudin mengatakan, Banggar dan TAPD telah menyesuaikan penjadwalan terhadap skema pembahasan APBD DKI tahun anggaran 2023. Penyesuaian itu diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta yang digelar pada Jumat (4/11).

Menurutnya, terjadi pergeseran jadwal terhadap agenda paripurna penandatanganan nota kesepahaman (MoU) rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2023. Awalnya Bamus merancang agenda penandatanganan MoU dilakukan pada Kamis (10/11), namun dimajukan menjadi Selasa (8/11). (fad)